

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sejenis Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan ruang publik di perpustakaan. Penelitian sejenis sebelumnya ini digunakan untuk menambah wawasan dalam melakukan penelitian dan juga untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, memperlihatkan kedalaman pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti, serta mengidentifikasi adanya celah dalam bidang yang akan diteliti. Beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang ditulis oleh Michael M. Widdersheim dan Masanori Koizumi (2016) dengan judul “*Conceptual Modelling of The Public Sphere in Public Libraries*” dalam *Journal of Dokumentasi*, Vol. 72 Iss 3 pp 591 -. 610. Studi ini difokuskan pada membangun sebuah model konseptual ruang publik di perpustakaan umum dan bagaimana perpustakaan umum berhubungan dengan ruang publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk perpustakaan, studi kasus dan menggunakan metode analisis isi kualitatif. *Output* dari penelitian ini adalah berhasil menciptakan model konseptual yang menggambarkan ruang publik di perpustakaan umum yang terdiri dari tata kelola dan manajemen, pengesahan dan *commons*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Michael M. Widdersheim dan Masanori Koizumi (2016) adalah adanya kesamaan objek penelitian yang berfokus pada ruang publik atau *public sphere* di perpustakaan umum. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada fokus yang dikaji, jika Michael M. Widdersheim dan Masanori Koizumi (2016) membahas tentang model konseptual ruang publik di perpustakaan umum, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran perpustakaan umum sebagai ruang publik bagi tunanetra.

Penelitian tentang peran perpustakaan sebagai ruang publik juga dilakukan oleh Rahma Sakinah, Nur Endah Nuffida dan Murni Rachmawati (2014) yang berjudul “Pendekatan tema jelajah dalam konsep dan rancangan perpustakaan sebagai ruang publik” dalam Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 3, No. 2, (2014) 2337-3520 (2301-928X Print). Penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah rancangan perpustakaan yang menarik, jauh dari kesan kaku dan tidak ramah serta melalui pendekatan tema “Jelajah” ini diharapkan perpustakaan dapat menjadi ruang publik yang menarik dan tidak membosankan untuk dikunjungi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Sakinah, Nur Endah Nuffida dan Murni Rachmawati (2014) yaitu sama-sama mengkaji tentang perpustakaan sebagai ruang publik, sedangkan perbedaannya yaitu jika penelitian yang dilakukan oleh Rahma Sakinah, Nur Endah Nuffida dan Murni Rachmawati (2014) mengkaji tentang bagaimana rancangan perpustakaan sebagai ruang publik sedangkan

penelitian ini mengkaji tentang peran perpustakaan sebagai ruang publik bagi tunanetra.

Penelitian tentang aksesibilitas perpustakaan bagi difabel juga ditulis oleh Ema Puji Lestari (2017) yang berjudul “Aksesibilitas Perpustakaan bagi Difabel Berdasarkan pada Standar IFLA di UPT Balai Layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aksesibilitas balai layanan Perpustakaan Grhatama Pustaka BPAD DIY dalam melayani pemustaka difabel dari aspek fisik dan non fisik berdasarkan standar IFLA, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan desain penelitian konklusif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ema Puji Lestari (2017) adalah sama-sama membahas tentang perpustakaan bagi difabel, dan perbedaannya terletak pada fokus kajiannya, penelitian Ema Puji Lestari (2017) hanya membahas tentang aksesibilitasnya saja, sedangkan penelitian ini lebih fokus membahas tentang perpustakaan juga dapat di jadikan sebagai ruang publik bagi disabilitas khususnya tunanetra.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Ruang Publik

Ruang Publik atau *Public Sphere* adalah sebuah pemikiran dari Jurgen Habermas, seorang filsuf dan sosiolog berkebangsaan Jerman pada abad ke-20, pemikiran Habermas ini dituangkan dalam suatu karya yang berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere: an Inquiry into a Catagory of Bourgeois*

Society pada tahun 1962 yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989. Inti dari karya tersebut adalah menjelaskan tentang analisis Habermas akan asal mula ruang publik Borjuis dan pengaruhnya terhadap perubahan struktural. Menurut (Habermas dalam Yadi, 2017) menyebutkan bahwa

“ruang publik dibagi menjadi dua jenis yaitu, ruang publik politik dan ruang publik sastra serta keberadaan dua jenis ruang publik ini memiliki makna dan ciri yang sama yaitu ruang tersebut dapat diakses semua orang, adanya kesetaraan, status sosial di kesampingkan, tumbuhnya aktivitas kritis publik, dan berkembangnya ruang publik ke arah komodifikasi.”

Istilah ruang publik ini berarti sebuah tempat dimana masyarakat dapat berkumpul secara setara dan tidak melihat adanya perbedaan serta setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, sejalan dengan yang disampaikan oleh (Hardiman dalam Yadi, 2017) ruang publik merupakan keadaan atau tempat yang dapat diakses oleh semua orang dan mengacu pada ciri terbuka dan inklusif . Prinsip-prinsip ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas tersebut mengedepankan adanya kebebasan dalam berbicara, berkumpul, kebebasan pers dan hak yang bebas untuk berpartisipasi dalam melakukan perdebatan serta hak untuk pengambilan keputusan (Hendrawan, 2015). Sedangkan menurut Herry Priyono dalam Prasetyo (2012) melakukan survey mengenai beberapa macam makna dari ruang publik, berdasarkan survey tersebut terdapat enam jenis pengertian, diantaranya yaitu modal sosial, pelayanan publik, kesehatan, jalan, tempat umum dan lingkungan hidup.

Asal mula ruang publik yang dijelaskan dalam buku Habermas (1989) yang berjudul *The Structural Transformation of The Public Sphere: an Inquiry into a Catagory of Bourgeois Society*, ruang publik tersebut pertama kali muncul pada

abad ke 17 di Eropa dan kemunculan ruang publik ini bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme, ruang publik pada saat itu ditempati oleh kelas komersial dan profesional. Menurut Hardiman (2010)

“Kata Publik atau *public* berasal dari bahasa latin yaitu *publicus*, dimana pada masyarakat Romawi kuno kata *Publicus* memiliki dua arti yang pertama milik rakyat sebagai satuan politis atau milik negara dan arti yang kedua adalah sesuai dengan rakyat dan seluruh penduduk atau dengan kata lain untuk umum”.

Istilah ruang publik mengacu kepada dua hal, pertama mengacu kepada sebuah tempat yang dapat diakses oleh semua orang, yang kedua ruang publik memiliki arti normatif, dimana ruang publik mengacu kepada peranan masyarakat dalam demokrasi (Hardiman, 2010). Berdasarkan beberapa pengertian ruang publik diatas, maka dapat diketahui bahwa ruang publik yaitu sebuah tempat dimana kepentingan masyarakat terungkap secara gamblang, tidak mendapatkan tekanan dari pihak manapun dan mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi.

2.2.2 Kontekstualisasi Ruang Publik di Perpustakaan

Perpustakaan umum adalah sebuah tempat atau lokasi guna untuk menyimpan koleksi berupa koleksi cetak, digital dan rekaman dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dan melayani masyarakat umum guna meningkatkan pengetahuan, sejalan dengan pendapat dari Sulistyo Basuki (1993 : 46) yaitu “Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh dana umum dengan tujuan untuk melayani umum”. Perpustakaan umum berbeda dengan perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi ataupun perpustakaan

khusus, perbedaan itu terletak pada layanan, fungsi utama perpustakaan dan juga pemustaka yang akan dilayani.

Adapun tugas dan fungsi perpustakaan umum yaitu memberikan layanan kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagai pusat informasi, pusat sumber belajar, tempat rekreasi, penelitian, dan pelestarian koleksi bahan pustaka yang dimiliki (Sutarno NS, 2006). Perpustakaan umum sering diibaratkan sebagai Universitas rakyat karena perpustakaan umum menyediakan semua jenis koleksi bahan pustaka dari berbagai disiplin ilmu, penggunaannya oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa kecuali. Unesco *Public Library Manifesto* dalam Sutarno NS (2006) juga menyebutkan perpustakaan umum adalah sebuah pusat informasi lokal yang membuat semua jenis pengetahuan dan informasi tersedia untuk semua para penggunanya dan dianggap sebagai wadah untuk tempat pembelajaran seumur hidup.

Tugas pokok perpustakaan umum menurut Sutarno NS (2006 : 53) adalah menghimpun, mengolah, memelihara dan mendayagunakan semua koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, perpustakaan umum melaksanakan fungsi-fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Pengkajian kebutuhan pemakai dalam hal informasi dan bahan pustaka
2. Penyediaan bahan pustaka yang diperlukan melalui pembelian, langganan, tukar menukar, penggandaan, penerbitan dan lain-lain.
3. Pengolahan dan penyiapan bahan pustaka

4. Penyimpanan dan pemeliharaan koleksi
5. Pendaaygunaan/pemberdayaan koleksi
6. Pemberian layanan kepada masyarakat dengan sistem yang mudah, cepat, dan tepat serta sederhana
7. Pemasyarakatan perpustakaan
8. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lain dalam rangka pemanfaatan bersama koleksi sarana prasarana
9. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai pihak-pihak dan mitra kerja lainnya.

Pada perpustakaan umum pemustaka yang dilayani adalah masyarakat secara umum, tanpa memandang status, ras, agama, ekonomi dan juga fisik. Perpustakaan umum adalah tempat berkumpulnya masyarakat, mengakses informasi secara bebas dan gamblang, dan bisa memberikan pendapat tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu perpustakaan umum juga disebut dengan ruang publik atau *public sphere*, sejalan dengan UU No. 43 tahun 2007 pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan layanan dan memanfaatkan perpustakaan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan, begitu juga halnya dengan yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing, sesuai dengan Pengertian perpustakaan umum menurut Sjahrial-Pamuntjak (2000;3) adalah: “Perpustakaan yang menghimpun koleksi buku, bahan cetakan serta rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum. Perpustakaan umum berdiri sebagai lembaga yang diadakan untuk dan oleh masyarakat. Setiap warga

dapat menggunakan perpustakaan tanpa dibedakan pekerjaan, kedudukan, kebudayaan dan agama. Meminjam buku dan bahan lain dari koleksi perpustakaan dapat dengan cuma-cuma atau dengan membayar iuran sekeadarnya sebagai tanda keanggotaan dari perpustakaan tersebut.” Menghadirkan ruh perpustakaan yang hangat, nyaman, akrab, setara, terbuka, merakyat, serta menimbulkan ruang *public sphere* yang dipenuhi diskusi hangat penuh solusi, menjadi sebuah keniscayaan bagi terciptanya perpustakaan yang ideal. Tidak hanya fasilitas yang dikejar, namun lebih kepada substansi adanya perpustakaan yaitu menambah ilmu pengetahuan pembaca sekaligus menghadirkan inspirasi solusi atas masalah yang ada.

Pada saat ini belum semua perpustakaan umum mampu memberikan atau membuat sebuah perpustakaan umum menjadi sebuah ruang publik bagi tunanetra, karena terhalang oleh beberapa faktor seperti kurangnya keamanan perpustakaan yang membuat tunanetra merasa tidak yakin dan tidak mau untuk memanfaatkan layanan di sebuah perpustakaan, dan juga disebabkan oleh sulitnya aksesibilitas perpustakaan umum untuk tunanetra serta kurang maksimalnya layanan juga fasilitas yang diberikan kepada penyandang tunanetra, sehingga dengan adanya faktor-faktor penghalang tersebut membuat perpustakaan umum belum mampu mewujudkan perpustakaan adalah ruang publik bagi tunanetra.

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai alat untuk agen perubahan atau *agent of change* dan tempat berkumpulnya seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa memandang adanya perbedaan fisik, ras, agama, suku

ataupun tingkat ekonomi serta perpustakaan adalah sebuah ruang publik bagi masyarakat.

2.2.3 Perpustakaan Sebagai Ruang Publik bagi Penyandang

Disabilitas Tunanetra

Istilah tunanetra sudah tidak asing lagi ditelinga kita, karena dalam kehidupan sehari-hari tunanetra sering kita temui dan sering berbaur bersama di tengah-tengah masyarakat, tunanetra dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang memiliki keterbatasan akan penglihatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tunanetra berasal dari kata tuna dan netra, tuna berarti cacat atau rusak sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Jadi, orang tunanetra yaitu yang memiliki kerusakan pada mata dan penglihatannya. Menurut Pradopo (1977) menyebutkan bahwa orang yang tunanetra belum tentu mengalami kebutaan, tetapi orang yang buta adalah tunanetra. Sedangkan menurut Kaufman dan Hallahan (1991) tunanetra yaitu orang yang memiliki lemah akan penglihatan dan akurasi penglihatan nya kurang dari 6/60. Pada saat ini para disabilitas netra memiliki keterbatasan akan akses informasi dan juga akses dalam kebebasan untuk menyampaikan pendapat didepan umum, yang disebabkan oleh kurangnya sarana, fasilitas dan wadah bagi tunanetra untuk ikut berpartisipasi. Orang yang memiliki cacat dalam penglihatan memiliki karakteristik khusus, menurut Sari Rudiwati (2002) karakteristik tunanetra ada tujuh, yaitu :

1. Rasa curiga terhadap orang lain
2. Perasaan mudah tersinggung

3. Verbalisme
4. Perasaan rendah diri
5. Suka berfantasi
6. Berfikir kritis
7. pemberani

Perpustakaan merupakan sebuah lembaga penyedia layanan informasi bagi setiap lapisan masyarakat dan juga berbagai kondisi fisik manusia, serta perpustakaan dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat di manfaatkan oleh tunanetra untuk menyalurkan aspirasi, pendapat dan juga tempat untuk berdiskusi, tetapi pada kenyataannya, perpustakaan belum sepenuhnya mampu menjadikan dirinya sebagai wadah penyalur aspirasi dan pendapat bagi tunanetra, di era informasi dan teknologi saat ini seharusnya perpustakaan mampu mengembangkan diri menjadi “perpustakaan yang inklusif” bagi tunanetra.

Perpustakaan inklusif adalah sebuah perpustakaan yang melakukan pendekatan layanan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan (Suharyanto, 2019). Kata inklusif berasal dari kata inklusi yang berarti penggabungan, yaitu suatu perpustakaan dapat memberikan layanan yang ramah bagi disabilitas tunanetra. Tak hanya itu, perpustakaan bagi tunanetra juga merupakan sebuah wujud kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi dan informasi tersebut digunakan untuk mendapatkan pembelajaran seumur hidup (Husna, 2013). Untuk mewujudkan sebuah perpustakaan yang dapat dijadikan ruang publik atau *public sphere* oleh tunanetra, maka perpustakaan harus mampu memenuhi kebutuhan akan

tunanetra itu sendiri, yang mana kebutuhan tunanetra di perpustakaan agar dapat menciptakan ruang publik adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas

Fasilitas dapat diartikan sebagai sarana pra sarana yang disediakan oleh perpustakaan, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya kaum tunanetra memiliki keterbatasan akan penglihatan yang secara otomatis harus mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat membantu dan mempermudah untuk mendapatkan layanan dari perpustakaan. Oleh karena itu sebuah perpustakaan harus menyediakan fasilitas-fasilitas khusus tunanetra.

2. Layanan

Perpustakaan tidak boleh mendiskriminasi pemustaka dengan alasan apapun termasuk kondisi fisik manusia, setiap orang berhak mendapatkan layanan yang sesuai dengan kondisi fisik masing-masing termasuk disabilitas netra, untuk dapat mewujudkan perpustakaan yang ramah dan dapat dijadikan ruang publik bagi tunanetra, maka salah satu yang harus dilakukan adalah memperhatikan layanan yang diberikan, dengan adanya sebuah layanan khusus yang diperuntukkan bagi tunanetra dalam mengakses dan memanfaatkan fasilitas dan ruangan, maka para tunanetra tersebut akan merasa mendapatkan hak yang sama dan akan sering melakukan kunjungan ke perpustakaan, dan dengan mereka merasa hak nya terpenuhi maka akan terwujudnya perpustakaan sebagai ruang publik bagi tunanetra, karena ruangan dan fasilitas akan mereka gunakan untuk mengakses informasi, melakukan diskusi tanpa adanya rasa canggung dan tertekan dengan keadaan lingkungan sekitar.

3. Aksesibilitas

Kata aksesibilitas tidak hanya dapat diartikan sebagai akses seseorang yang akan memasuki atau menuju suatu bangunan atau ruangan, bagi tunanetra kata aksesibilitas dalam suatu perpustakaan dapat mencakup artian yang lebih luas yaitu pada akses menuju keseluruhan pelayanan perpustakaan, perlakuan dan kesempatan yang sama pada masyarakat pada umumnya. Aksesibilitas dapat dikategorikan menjadi dua, yakni aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik, aksesibilitas fisik adalah segala hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana seperti ruangan dan bangunan yang memberikan kemudahan bagi tunanetra. Sedangkan aksesibilitas non fisik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi dan komunikasi bagi tunanetra. Jika perpustakaan mampu memberikan aksesibilitas yang mudah digunakan dan dimanfaatkan oleh tunanetra maka perpustakaan tersebut akan mampu memberikan peranan yang penting sebagai ruang publik, karena seperti yang kita ketahui perpustakaan umum adalah sebuah fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan, baik melalui ras, agama, suku dan juga fisik.

Perpustakaan harus menerapkan tiga aspek tersebut agar terwujudnya perpustakaan sebagai ruang publik bagi tunanetra, sebagaimana yang kita ketahui perpustakaan umum adalah sebuah fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang tanpa membedakan ras, agama, dan kondisi fisik. Telah diatur dalam UU No. 43 tahun 2007 pasal 5 ayat 3 yang menyebutkan bahwa setiap masyarakat berhak mendapatkan layanan dan memanfaatkan perpustakaan serta mendayagunakan fasilitas perpustakaan,

begitu juga halnya dengan yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing